

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Pertama, Skripsi Citra Putri Utami yang membahas tentang, **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Dan Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Partai Hanura Tahun 2018)**⁸. Secara singkat skripsi Citra Putri Utami menjelaskan bahwa factor utama yang membuat adanya konflik di dalam internal partai politik Hanura adalah adanya dualisme kepengurusan yang terjadi antara kepengurusan kubu Oesman Saptia Odong dan kubu pimpinan Daryatmo. Kubu Daryatmo mengatakan bahwa adanya masalah dalam gaya kepemimpinan OSO yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan di dalam kepengurusan dan penyewenangan uang partai kedalam rekening pribadi OSO. Sedangkan kubu OSO tidak menerima bahwa keputusan dari sidang pleno yang membuat Daryatmo sebagai ketua umum partai Hanura karena tidak ada dasar hukum yang menompang Daryatmo sebagai ketua umum karena tidak keluarnya SK Menkum HAM dan perubahan struktur kepengurusannya yang di nilai tidak memenuhi syarat di dalam AD/ART. Perbedaan pendapat dan kepentingan dari kedua belah kubu tersebut memicu adanya konflik di dalam internal partai Hanura yang berjalan selama tiga tahun lamanya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Karena

⁸. Citra Putri Utami, Skripsi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Dan Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepengurusan Partai Politik Di Indonesia (Studi Kasus Terhadap Partai Hanura Tahun 2018). Program Sarjana, Universitas Pancasakti Tegal, 2020.

berdasarkan aturan dan hukum yang ada, kepengurusan Oesman Sapta Odang lah yang resmi sebagai kepengurusan sah di mata hukum karena ada SK Menkum HAM sebagai payung hukumnya. Berbeda dengan kepengurusan Oesman Sapta Odang, struktur kepengurusan Daryatmo tidak di kirimkan kepada Menkum HAM sebagai kepengurusan yang sah dan legal dimata hukum, walaupun memperoleh suara yang mutlak untuk penurunan Oesman Sapta Odang di dalam Musyawarah Luar Biasa pada tahun 2017, namun kepengurusan Daryatmo terlihat semu karena belum adanya payung hukum yang legal. Hal tersebut merupakan dilemma di dalam partai Hanura , terutama untuk kader kader yang tidak menyukai gaya kepemimpinan Oesman Sapta Odang. Karena pada zaman sekarang kader partai tidak terikat secara ideologis, yang dapat menyebabkan kader unggulan partai Hanura hengkang dari partainya ke partai yang baru seperti Fauzi H. Amro yang merupakan anggota DPR RI dari kader Hanura pada tahun 2014 yang memutuskan pindah partai karena melihat adanya ketidakstabilan di dalam internal partai Hanura. Pada akhirnya Fauzi H. Amro memutuskan untuk pindah ke partai PAN.



Kedua, Jurnal Yusa Djuyandi yang membahas tentang Konflik Internal PPP di Tengah Pilkada Jawa Barat 2018⁹. Jurnal ini membahas tentang konflik internal partai PPP di tengah Pilkada Jawa barat pada tahun 2018. Bahwa pada tahun 2018 terjadi konflik internal pada masa kepemimpinan Suryadharma Ali yang tersangka kasus KPK, dan munculnya dua nama yang menjadi calon yaitu Romahurmuziy dan Djan faridz. Walaupun begitu, kepemimpinan PPP yang diakui oleh KPU secara resmi adalah kepemimpinan Romahurmuziy. Kedua belah pihak pun berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan beberapa cara yaitu melalui AD dan ART partai, Mahkamah Partai Politik, dan pengadilan Negeri. Menurut direktur eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN), Yasin Muhammad, dipicu oleh beberapa masalah, yaitu adanya kubu internal yang tidak menggunakan system demokrasi partai, kedua adanya faksi-faksi di internal Partai. Konflik yang terjadi pada pilkada Jawa Barat dimulai pada munculnya nama UU Ruzhanul Ulum sebagai pasangan Ridwan Kamil. Sebelumnya nama Uu Ruzhanul Ulum sudah di wacanakan pada tahun 2017 oleh Romahurmuziy. Walaupun beberapa nama lain di pertimbangkan untuk menjadi pendamping Ridwal Kamil seperti Imanul Haq dari PKB dan Saan Mustofa dari Nasdem. Namun menurut Romy, kedua nama tersebut kurang unggul dari kader partainya, Uu Ruzhanul Ulum, yang sudah menuai pengalaman sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode. Walaupun pimpinan PPP mendorong pencalonan Uu Razhanul sebagai pendamping Ridwan Kamil, namun beberapa kader dan pengurus PPP menghadiri kampanye beberapa calon kepada daerah yang diusung oleh partai lain menjelang Pilgub Jawa Barat tahun 2018. Dukungan yang terpecah akibat konflik internal partai membuat memperkeruh status PPP di dalam Pilgub Jawa Barat. Karena adanya konflik tersebut memberikan dampak yang negative terhadap kontestasi di tingkat daerah, dan situasinya saat itu PPP masuk kedalam partai yang akan kesulitan dalam mendulang suara pada

⁹ Djuyandi, Yusa. *Konflik Internal PPP di Tengah Pilkada Jawa Barat 2018 Vol. 5, No. 2, November 2020*, Hal. 176.

pemilihan umum 2019. Dampaknya, di provinsi Jawa Barat, PPP pada akhirnya harus kehilangan 6 kursinya di DPRD Provinsi Jawa Barat, dari yang tahun 2014 mendapat kursi sebanyak 9, namun pada tahun 2019 hanya mendapatkan 3 kursi.

2.2 Kerangka Teori dan Konsep

2.2.1 Teori Partai Politik

Partai politik memiliki kehadiran yang sangat berarti bagi masyarakat. Karena di dalam era system politik klasik dan memasuki era metode berpolitik modern, partai politik sendiri memberikan dampak dalam formasi politik secara drastis. Partai politik mengubah relasi antara masyarakat dengan penguasa, dengan adanya partai politik membuat masyarakat memiliki instrument utama untuk berkompetisi dan mendapatkan kendali atas institusi-institusi politik.

Dengan berhasilnya partai politik menguasai atau menduduki kader-kader unggulannya di dalam kursi daerah, hingga presiden, partai tersebut mendapatkan kendali akan kebijakan-kebijakan yang akan di keluarkan entah itu untuk kepentingan masyarakat, kepentingan elit, hingga kepentingan partai politik itu sendiri, hal tersebut sudah berjalan dari tahun 1955, memasuki zaman Orde Baru, hingga masa pasca reformasi saat ini. Walaupun adanya perbedaan pandangan partai politik pada masa Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi, namun tujuan partai politik tetap sama, yaitu menduduki kursi-kursi penting di pemerintahan dari pusat hingga daerah. Partai politik juga memiliki fungsi untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat melalui wakil partainya di kursi pemerintahan pusat hingga di daerah dengan tujuan untuk menyambungkan suara, kebutuhan, keluhan, dan mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partai politik.

Partai politik di buat untuk menyalurkan dan mengakomodasi pendapat dan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan elit semata yang mengakibatkan partai politik sebagai kendaraan politik untuk elit. Banyaknya partai politik pada saat ini pasca selesainya reformasi membuat partai politik dilihat bukan dari ideologi partainya, namun partron partai tersebut atau ketua umumnya yang menjalankan dan memimpin roda partai untuk berputar.

Di dalam buku Partai Politik “Teori dan Praktik di Indonesia” yang ditulis oleh Sigit Pamungkas, mengatakan bahwa ada beberapa definisi mengenai partai politik. Yaitu antara lain :

- a. Bahwa partai politik merupakan organisasi, sebagai sebuah organisasi, partai politik merupakan entitas yang bekerjanya didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Seperti adanya anggota, pemimpin, pengorganisasian, pelaksanaan, dan control serta adanya aturan yang mengikat perilaku kader partai politik.
- b. Partai politik merupakan sebuah instrumen perjuangan nilai atau ideologi. Dengan adanya partai politik yang merupakan sekumpulan dari beberapa individu yang memiliki nilai kolektif dan memiliki sifat yang mengikat. Partai politik yang memiliki sebuah ideologi memiliki fungsi sebagai pemandu perilaku partai dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Maka jika sebuah partai politik mendeklarasikan dirinya sebagai partai sosialis, nasionalis, atau agama, maka klaim atas ideologi tersebut merupakan identitas bagi partai dan sebagai penuntun keseluruhan perilaku individu dan organisasi partai.
- c. Lalu yang ketiga adalah partai politik sebagai perjuangan yang melalui penguasaan struktur kekuasaan. Dalam artianya, partai politik memiliki orientasi pada kekuasaan, yaitu untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Namun,

kekuasaan tersebut didasarkan dengan artian untuk mengimplementasi nilai-nilai ideologi yang merupakan identitas partai, bukan hanya sekedar mengejar kekuasaan.⁹

Dapat dikatakan dalam buku Sigit Pamungkas bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi dan karakteristik tersendiri dan kehadiran dari partai politik sendiri memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat di dalam pemerintahan. Dapat di katakan juga bahwa partai politik memiliki orientasi terhadap kekuasaan. Yaitu merebut, mengusai, dan mempertahankan kekuasaan demi ideologi partai bukan semata-mata mengejar kekuasaan untuk kepentingan kelompok. Namun pada saat ini tujuan partai politik untuk mendapatkan kekuasaan mayoritas adalah karena adanya kepentingan elit-elit politik di dalam pemerintahan, bahkan di dalam tubuh internal partai politik. Seperti di dalam tubuh partai politik Hanura yang dimana Oesman Sapta Odang memutuskan untuk menduduki koleganya di dalam DPD kedalam DPP dan ketua di beberapa DPP Hanura.

2.2.2 Teori Kekuasaan

Pada hakikatnya, kekuasaan merupakan suatu hal yang di perebutkan dan dipertahankan oleh para elit politik. Karena dengan memegangnya sebuah kekuasaan maka individu ataupun kelompok yang memiliki kepentingan dapat mengakomodir hal tersebut dengan terbukannya akses-akses kebijakan. Miriam Budiarjo dalam bukunya mengatakan bahwa kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok yang lain.¹⁰

W.A. Robson, dalam *The University Teaching of Social Sciences*, mengatakan: “Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik tertuju pada perjuangan

⁹ Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia* (Yogyakarta: Perum Griya Saka Permai, 2011), hlm 3-6

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 17-18

untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.¹¹ Dapat dikatakan juga bahwa kekuasaan merupakan sebuah kegiatan yang menyangkut hal perebutan dan mempertahankan kekuasaan. Perebutan kekuasaan tersebut muncul di dalam partai politik Hanura saat ketua umum partai politik tersebut, Wiranto memutuskan untuk mundur dari kursi jabatan dan menerima tawaran Jokowi menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM dan ditunjuknya Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum yang baru.

Perebutan kekuasaan yang muncul karena banyaknya kader Hanura yang tidak menyukai gaya kepemimpinan Oesman Sapta Odang dengan memutuskan untuk mengungsung ketua umum yang baru yaitu Daryatmo. Perebutan kekuasaan di dalam partai Hanura sendiri merupakan perebutan kekuasaan kursi ketua umum, karena pada dasarnya kursi ketua umum merupakan posisi yang sentral dan strategis di dalam partai politik. Karena dengan menduduki kursi ketua umum, elit sendiri memiliki kuasa terhadap rekomendasi-rekomendasi kader politik di pemerintahan entah itu daerah maupun pusat. Namun, perebutan kekuasaan tersebut menciptakan kubu-kubu di dalam tubuh partai Hanura yang menyebabkan adanya perbedaan pandangan kader di dalam partai.

Keputusan tersebut menimbulkan banyaknya konflik di dalam internal partai politik Hanura mengakibatkan menurunnya elektabilitas partai itu sendiri. Bahkan juga bisa menyebabkan adanya ketelantaran kader-kader partai di daerah karena focus partai pada saat itu adalah penyelesaian permasalahan di tingkat pusat.

2.2.3 Teori Konflik Politik

Dalam kehidupannya, manusia merupakan makhluk hidup yang tidak dapat hidup secara individu, sebagai makhluk hidup sosial di dalam kehidupannya terdapat interaksi terhadap

¹¹ W.A. Robson, *The University Teaching of Social Sciences: Political Science (Teaching in the Social Sciences)*; Paris: UNESCO, 1954), hlm. 24.

manusia lainnya. Selain tidak dapat hidup secara individu, manusia memerlukan interaksi dengan orang lain. Interaksi yang terjadi didalam kehidupan manusia memiliki potensi untuk menimbulkan suatu konflik karena setiap manusia tidak mungkin memiliki tujuan atau kepentingan yang selalu bersamaan. Konflik itu sendiri dapat timbul antara individu dengan individu, antara kelompok dengan individu, atau antara kelompok dengan kelompok. Konflik interaksi tersebut timbul karena adanya perbedaan kepentingan dan tujuan.

Pada umumnya, konflik antar individu dengan individu relative mudah untuk di tangani karena konflik tersebut tidak melibatkan orang lain. Dan konflik tersebut hanya melibatkan kedua individu tersebut. Namun, konflik yang telah melibatkan suatu kelompok pada umumnya memiliki sifat yang relative sulit untuk di selesaikan.

Berbeda dengan konflik individu, konflik antar kelompok sulit untuk diselesaikan karena melibatkan banyak pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Salah satu konflik kelompok adalah konflik politik.

Konflik politik biasanya muncul karena adanya perbedaan kepentingan yang mengandung konflik. Konflik tersebut muncul karena adanya suatu peristiwa kontroversi di dalam berbagai peristiwa politik. Sebut saja seperti kasus Ahok dalam pidatonya di kepulauan seribu yang menyangkut isu penistaan agama islam yang menjadi sebuah senjata bagi lawan politiknya. Konflik politik juga merupakan konflik elitis yang muncul karena adanya kepentingan dari salah satu kelompok dan memiliki pandangan yang berbeda dengan kelompok yang lain.

Dan salah satu contoh lainnya adalah konflik politik yang ada di dalam tubuh partai politik Hanura pasca turunnya Wiranto sebagai ketua umum dan naiknya Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum yang baru secara aklamasi. Hal tersebut karena adanya ketidaksetujuan kader partai, elit partai, dan petinggi partai atas naiknya Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum yang sah pada tahun 2016. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut menyebabkan konflik internal partai Hanura dan memberikan dampak negative terhadap fungsi partai, kader

partai di daerah, dan menurunnya perhatian partai terhadap pengurus daerah karena semua terfokus kepada konflik di dalam kepengurusan pusat.



Di dalam buku Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik* mengatakan bahwa konflik politik merupakan sebuah konflik sosial, yang dimana keduanya memiliki ciri-ciri yang mirip. Yang membedakan antara kedua hal tersebut adalah, bahwa konflik politik memiliki keterkaitan dengan negara, pemerintahan, para pejabat politik, atau pemerintahan dan kebijakan.¹²

2.2.4 Teori Kelompok Kepentingan

Politik pada hakikatnya adalah cara upaya manusia untuk mencapai sebuah kesejahteraan dalam hidupnya. Dijelaskan oleh Ramlan Subakti bahwa Kelompok kepentingan merupakan sejumlah orang yang punya kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dalam mencapai suatu tujuannya.¹³ Terjadinya konflik di dalam tubuh partai Hanura menyebabkan adanya dualisme dan menciptakan dua kubu yang berbeda, yaitu kubu Oesman Sapta Odang dengan kubu Daryatmo yang di motori oleh Syariffudin Sudding. Hal itu disebabkan dengan adanya perbedaan kepentingan dari dua belah kelompok yaitu berupa kursi ketua umum partai Hanura setelah di tinggalkan oleh Wiranto pada tahun 2016. Adanya perbedaan pemahamandan tujuan antara kader partai yang berada di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Odang membuat Gerakan di dalam tubuh partai yang di kendalikan oleh Syariffudin Sudding untuk mengambil kembali kendali partai dari Oesman Sapta Odang dengan mengusungkan nama ketua partai yang baru pada tahun 2017 yang bernama Daryatmo. Namun, diduga bahwa pergerakan Sudding merupakan kendali dari Wiranto yang memiliki kepentingan dan tidak menyetujui kepemimpinan Oesman Sapta Odang namun beliau sendiri yang merekomendasikan nama Oesman Sapta Odang pada Musyawarah Nasional Luar Biasa pada tahun 2016.

¹² Rauf, Maswadi, 2001, *consensus dan konflik politik*, DIKTI, Jakarta. Hal 19

¹³ Subakti, ramlan, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta : PT Grasindo, 2007), hlm 109.

2.3 Kerangka Pemikiran

Partai politik didirikan untuk menjalankan fungsi-fungsi partai politik yang ada, dari bentuk Pendidikan, pengkaderan, komunikasi, dan menjalankan roda perpolitikan negara. Partai politik di masa rekormasi menjadi bentuk kendaraan politik yang pragmatis dan memiliki tujuan untuk memenangkan calon presiden ataupun kadernya untuk menduduki kursi-kursi strategis di negara agar kepentingan partai bisa tersalurkan. Dengan adanya kepentingan tersebut partai politik memiliki pola kaderisasi di setiap daerah untuk menguatkan partai tersebut di daerah untuk persiapan pemilu mendatang. Karena jelas, dengan banyaknya masyarakat yang mempercayai partai politik di setiap daerah akan besar peluang partai memenangkan kontestasi politik secara nasional maupun di daerah.

Partai Hanura didirikan dengan tujuan untuk melayani suara-suara dari masyarakat. Namun, fungsi-fungsi partai politik tersebut terabaikan dengan adanya kepentingan dari elit politik yang memiliki ambisi untuk menduduki kursi kepemimpinan partai dengan tujuan mereka masing-masing. Pada tahun 2016, pasca turunnya wiranto dari kursi kepemimpinan Hanura menimbulkan persaingan dan perebutan kekuasaan. Adanya kepentingan yang berbeda dari kedua belah pihak, yaitu kubu Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum yang sah dan kubu Daryatmo yang menjadi ketua umum partai politik Hanura di dalam rapat Pleno pada tanggal 15 Januari 2018. Karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan di dalam kalangan elit politik, maka terjadilah konflik antar elit politik di dalam partai politik yang disebut sebagai konflik politik. Konflik politik tersebut menimbulkan adanya perpecahan di dalam tubuh partai politik Hanura yang mengakibatkan adanya dua pemimpin partai yaitu Oesman Sapta Odang dan Daryatmo. Berjalannya partai politik yang tidak stabil di dalam pimpinan pusatnya mengakibatkan jatuhnya elektabilitas partai politik Hanura yang sempat naik pada tahun 2009 sampai tahun 2014.

